

Kontribusi Etnografi Feminis Dalam Pekerjaan Sosial Kritis

(Refleksi Penelitian tentang Perkawinan Anak dan FGM)

Wariyatun¹, Qoniah²

Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (Universitas Muhammadiyah Madiun)
war600@ummad.ac.id¹, qon700@ummad.ac.id²

Abstract

Ethnography is well-known as a research method that is usually applied in anthropology. In its development, social science and humanities researchers have adopted ethnography as their research method. The development program applied ethnography for baseline, monitoring, and evaluation methods. It is applied especially for examining problems rooted in the socio-cultural context. Translating cultural reflection on field work is a power of ethnography. Ethnography provides a means to describe events, socio-cultural phenomena, and social issues. Those phenomena are analyzed and interpreted from the perspective of the subject of research. This paper argues that ethnography contributes to critical social work studies by translating the cultural meanings behind child marriage and female genital mutilation (FGM) phenomena. It also argues that a feminist approach combined with ethnography can minimize research dilemmas, capture injustice, and unravel the intersectionality inherent in social work. Research on child marriage and FGM requires not only ethnography but also a feminist approach. A feminist approach can explore the power relations between men and women in the issues of FGM and child marriage. Feminist ethnography's methods can uncover power relations and injustices in society. This paper utilizes a critical reflection method for data collection. Applying a critical reflection based on the researcher's experience in research on child marriage and FGM, it is found that ethnography can translate the cultural meanings behind child marriage and FGM. Further findings indicate that a feminist approach combined with ethnography can minimize research dilemmas, capture injustice, and unravel the intersectionality inherent in social work. This study employs critical reflection for data collection. The data analyzed in this paper is the author's personal experience conducting two research projects in East Nusa Tenggara (NTT) in 2019, and in West Nusa Tenggara (NTB) and East Java in 2025.

Keywords : *ethnography, anthropologi, feminist, social work, social injustice*

PENDAHULUAN

Kajian ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap etnografi feminis yang mulai banyak dikenal di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Metode ini dianggap oleh penulis mampu menjadi sebuah metodologi yang tepat untuk mengkaji persoalan sosial terutama yang dialami perempuan sebagai bagian dari kelompok marginal. Kelompok rentan ini merupakan subyek intervensi para pekerja sosial. Perempuan mendapatkan perhatian khusus para pekerja sosial terutama pekerja sosial yang fokus pada kajian perempuan, anak dan keluarga.

Etnografi banyak digunakan oleh para peneliti sosial terutama para antropolog sebagai metode penelitian selama berpuluh-puluh tahun. Kebudayaan menjadi fokus kajian dari etnografi tersebut. Dalam perkembangannya, tidak hanya para antropolog yang menggunakan etnografi tetapi para peneliti sosial lain pun menggunakan metode ini untuk mengkaji persoalan-persoalan sosial yang menjadi bidang kajian mereka.

Diyakini bahwa persoalan sosial seperti perkawinan anak dan sunat perempuan berkaitan dengan budaya dan norma yang hidup dalam masyarakat. Memahami budaya dan norma masyarakat tidak cukup dikuantifikasi. Mubarok, Rafiq, al Asyari (2026) dan Ida dan Saud (2020) menunjukkan peran budaya dalam perkawinan dan sunat perempuan yang dipraktikkan oleh suatu kelompok. Pemahaman mendalam tentang budaya tersebut dapat diperoleh dengan cara mengamati dan tinggal bersama masyarakat tersebut dalam kurun waktu tertentu sebagaimana biasa dilakukan peneliti yang menggunakan etnografi sebagai pendekatan.

Tulisan ini merupakan refleksi penulis saat tergabung ke dalam tim konsultan PLAN International dan UNICEF saat melakukan penelitian tentang perkawinan anak dan sunat perempuan. Refleksi tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh selama penulis bekerja sebagai seorang pendamping di beberapa lembaga perlindungan perempuan, kemudian mempelajari teori etnografi dari bangku kuliah. Dari refleksi tersebut, peneliti menemukan bahwa etnografi dibutuhkan untuk membantu memahami persoalan perkawinan anak dan sunat perempuan sebab kedua isu tersebut berkaitan erat dengan norma dan budaya masyarakat. Namun demikian, penggunaan etnografi saja tidak cukup menjawab persoalan perempuan. Pendekatan feminis yang lahir dari ideologi feminisme dalam etnografi dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran relasi kuasa dan isu interseksionalitas yang sering terjadi dalam kasus perkawinan anak dan sunat perempuan. Refleksi lebih lanjut menemukan bahwa penelitian tentang perkawinan anak dan sunat perempuan dengan metode etnografi merupakan penelitian lintas disiplin ilmu; antara antropologi yang sering menggunakan metode etnografi dan disiplin ilmu pekerjaan sosial, sebuah ilmu terapan yang mengupayakan pemecahan permasalahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu atau kelompok yang diintervensi (IFSW, IASSW: 2014).

Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana kontribusi etnografi feminis dalam memecahkan persoalan perkawinan anak dan sunat perempuan? Bagaimana kontribusi etnografi feminis terhadap disiplin ilmu pekerjaan sosial? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, penulis mengambil data dengan cara merefleksikan proses pengambilan data selama penelitian studi yang dilakukan oleh tim konsultan PLAN dan UNICEF (penulis ada di dalam tim tersebut) di tahun 2019 dan 2025.

Penulis feminis Indonesia yang menggunakan metode etnografi feminis dalam penelitian mereka seperti Suryakusuma (2011) dan Noerdin (2005) adalah dua contoh ilmuwan yang menggunakan pendekatan etnografi feminis dalam penelitian mereka tentang perempuan Indonesia. Penggunaan metode etnografi oleh para feminis, menjadi bukti bahwa etnografi bukan lagi hanya "milik" para antropolog. Artikel ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana metode etnografi yang banyak dipelajari dalam disiplin Antropologi berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan sosial yang dihadapi oleh (perempuan) anak? Di tengah-tengah perdebatan linearitas disiplin keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang dosen, tetapi dalam praktiknya di lapangan, persoalan sosial harus dijawab melalui praktek multidisiplin ilmu.

Refleksi Pertama: Evaluasi Program Perkawinan Anak

Pada tahun 2019, saya tergabung dengan beberapa peneliti diminta melakukan studi evaluasi tentang perkawinan anak di NTT oleh PLAN International. Studi tersebut bertujuan untuk melihat norma sosial yang mendorong terjadinya perkawinan anak di lokasi-lokasi intervensi mereka serta dampak program terhadap penghapusan perkawinan anak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terbatas. Selama kurang lebih dua minggu, tim peneliti yang terdiri dari satu ketua dan tiga peneliti melakukan pengambilan data di dua kabupaten di NTT. Tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan penelitian saat itu selain karena keterbatasan waktu, kondisi Indonesia masih dalam masa COVID. Semua peneliti, asisten dan informan yang terlibat dalam penelitian menerapkan protokol kesehatan. Aturan yang berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain terkait penerapan protokol kesehatan, juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam waktu dua minggu, kami harus mampu membaca dan menterjemahkan budaya (setidaknya dua) etnis yang berbeda; Bugis dan suku-suku asli flores.

Refleksi kedua: Baseline studi Sunat Perempuan

Pada tahun 2025, saya dan tim yang berbeda dengan dukungan dari UNICEF Indonesia bekerjasama dengan LPA Jawa Timur dan LPA NTB melakukan studi awal tentang fenomena sunat perempuan (Female Genital Mutilation/FGM) di tiga kabupaten di NTB dan Jawa Timur. Program tersebut merupakan kelanjutan dari upaya intervensi terhadap praktek-praktek bahaya (*harmful*

practices) untuk anak perempuan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui baseline ini adalah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyusun bentuk intervensi sunat perempuan di lokasi-lokasi dampingan LPA NTB dan LPA Jawa Timur. Baseline tersebut menggunakan metode quantitative dan qualitative secara bersamaan. Pengambilan data dilakukan melalui survey, diskusi terbatas dan wawancara mendalam. Dalam pengambilan data, tim inti dibantu oleh para enumerator dan asisten peneliti lokal.

Saya dan seorang kolega peneliti, melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara mendalam dan diskusi terbatas. Dalam keterbatasan waktu pengambilan data, saya menyempatkan diri untuk melakukan observasi singkat terhadap lokasi penelitian dan para informan yang terlibat dalam diskusi terbatas maupun wawancara mendalam. Pengambilan data saat itu dilakukan pada bulan puasa. Lokasi tempat baseline kami sangat ramai pedagang dan pembeli menjelang jam buka puasa. Balai desa tempat FGD saya lakukan, bersebelahan dengan masjid yang sangat besar. Hampir semua perempuan yang kami temui selama pengambilan data di NTB menggunakan kerudung. Kondisi yang saya selama pengambilan data di Lombok Barat menunjukkan bahwa Islam sangat kuat di wilayah tersebut.

Baik di Lombok Barat maupun di Jawa Timur, kami sempat mengalami kendala penguasaan bahasa lokal. *Papu'* (istilah orang Lombok Barat untuk menyebut dukun bayi) yang telah berusia tua, menjawab wawancara yang kami lakukan dengan bahasa Sasak. Sementara dukun di Jember yang kami temui, menjawab pertanyaan penelitian kami dengan bahasa Madura. Kehadiran penerjemah membantu kami, namun sebagai peneliti, makna yang bisa ditangkap tidak seluas jika percakapan dilakukan langsung. Pada saat diskusi terbatas dilakukan di salah satu gampong yang saya pimpin, hadir perwakilan dari tokoh adat, tokoh desa, tokoh perempuan, bidan, perawat dan seorang dukun perempuan tua. Pada saat diskusi akan kami mulai, tiba-tiba dukun tersebut menghilang dan tidak ikut diskusi terbatas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah refleksi kritis. Dalam refleksi kritis, salah satu komponen yang penting adalah proses belajar dari sebuah pengalaman (Fook, 2011: 55). Refleksi kritis secara garis besar didefinisikan sebagai sebuah dialog internal yang dibangun, dekonstruksi dan direkonstruksi (Morelay, 2008:149). Penulis menggunakan pengalaman penulis saat melakukan baseline tentang pencegahan perkawinan anak di NTT pada tahun 2019 dan pencegahan sunat perempuan di NTB serta Jawa Timur pada 2025 sebagai basis data. Di kalangan feminis, merefleksikan pengalaman adalah bagian penting dalam membangun pengetahuan perempuan (Naples, 2004; Wariyatun, 2021b). Begitupun bagi seorang pekerja sosial, merefleksikan pengalaman sehari-hari dalam melakukan intervensi juga menjadi bagian penting untuk membangun rencana intervensi yang baik dan tepat bagi klien (Morrow, 2024)

Baseline study dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Baseline tentang pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan diskusi kelompok terbatas. Tim konsultan dibagi menjadi dua kelompok yang bertugas melakukan pengambilan data di dua kabupaten. Masing-masing tim beranggotakan dua orang. Setiap tim dibantu oleh asisten peneliti lokal. Setiap selesai pengambilan data, tim peneliti melakukan refleksi tentang proses pengambilan data serta temuan yang diperoleh. Sebagai contoh, peneliti mendiskusikan kendala menemukan informan laki-laki usia sekolah yang telah putus sekolah karena ikut orang tuanya pergi melaut dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu, pengambilan data baseline studi pencegahan sunat perempuan dilakukan menggunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok terbatas dan survey. Tim peneliti melakukan refleksi tentang proses pengambilan data dan temuan setiap selesai pengambilan data dilakukan. Proses refleksi juga dilakukan terkait dengan kerjasama dengan asisten peneliti lokal yang berbeda budaya dan relasi kuasa dengan peneliti.

Penggunaan refleksi kritis memungkinkan penulis untuk merefleksikan metode penelitian yang digunakan dalam baseline, keterhubungan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain serta dinamika hubungan kuasa dalam penggunaan keilmuan tersebut.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Feminisme sebagai Kerangka Berpikir

Feminisme bukan pendekatan yang tunggal (Gamble, 2004; Rivers, 2017; Tong & Botts, 2018). Ada banyak ragam tentang feminisme. Tong and Botts (2018:11) bahkan mengatakan feminis menolak pengkategorian ke dalam kotak yang rapi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa “interdisciplinary”, “intersectional”, and “interlocking” adalah kata yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan kata feminisme. Rivers (2017) menuliskan feminisme sebagai judul buku dalam bentuk jamak “feminism(s)”. Hal ini berarti bahwa Rivers pun mengakui ada banyak model feminisme untuk mendekati persoalan sosial. Pendekatan feminisme yang tidak tunggal ini harus penulis sampaikan sebelum menerapkannya dalam melihat penggunaan etnografi feminis dalam penelitian isu perkawinan anak dan sunat perempuan.

Feminisme sering dikaitkan dengan paradigma postmodernisme. Dalam banyak literatur dikatakan bahwa paradigma postmodernisme lahir sebagai kritik terhadap paradigma modernisme, yang dirasa tidak mampu menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi. Namun demikian, ternyata paradigma postmodernisme itu sendiri dinilai tidak mampu menjawab ketidakadilan yang terjadi pada perempuan. Oleh karena itu, paradigma feminisme muncul untuk membantu menjawab persoalan ketidakadilan terhadap perempuan. Keuntungan mendekati sebuah persoalan sosial dengan pendekatan feminisme menurut Miller (2017:58) adalah kemampuan pendekatan tersebut melihat persoalan ketidakadilan secara dalam. Lebih lanjut, Miller menyebutkan bahwa pada saat pendekatan tersebut diturunkan ke dalam strategi pengambilan data, data tersebut mampu memberikan kontribusi positif pada subyek yang diteliti, yaitu perempuan. Selain itu, peneliti juga mampu merefleksikan pengalaman pribadinya selama melakukan penelitian. Positioning peneliti terhadap perempuan sebagai subyek yang diteliti syarat dengan relasi kuasa. Refleksi terhadap positioning tersebut akan meminimalkan potensi dominasi peneliti terhadap subyek yang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan feminisme gelombang ketiga yang menekankan interseksionalitas dalam melihat persoalan perempuan. Perkawinan anak dan sunat perempuan banyak terjadi pada anak perempuan dan sering berkaitan dengan norma, nilai serta budaya tertentu. Relasi kuasa dan interseksionalitas dalam isu tersebut membutuhkan pendekatan feminis. (Mulinari & Sandell, 2009; Naples, 2003; Wariyatun, 2021b).

B. Etnografi sebagai Metode Penelitian Persoalan Sosial

Etnografi sebagai metode penelitian erat kaitannya dengan disiplin ilmu Antropologi (Agar, 1996; Balestrery, 2016; Bernard, 2006; Clifford & Marcus, 1986; Marcus, 1991). Dalam perkembangannya, para antropolog Indonesia mengatakan bahwa saat ini dibutuhkan antropologi yang berbeda (Abdullah, 2014; Heddy Shri Ahimsa Putra (ed), 2014). Indonesia membutuhkan antropologi yang bukan sekedar antropologi tentang “yang lain” sebab masyarakat mengalami perkembangan yang terbagi menjadi 3 tahapan (Abdullah, 2015:16-17). Tahap pertama, pergeseran budaya agraris dalam masyarakat pertanian menjadi budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh pasar. Kedua, pengaruh pasar ke dalam kehidupan yang menyebabkan keterhubungan masyarakat terhubung ke dalam sistem pasar yang lebih besar baik dari sisi ide, nilai maupun praktek. Ketiga penataan sistem sosial masyarakat yang dipengaruhi ekspansi pasar. Dampak dari perubahan tersebut terlihat dari melemahnya ikatan-ikatan tradisional dan rumah produksi yang baru. Pergeseran masyarakat tersebut memunculkan persoalan-persoalan sosial yang berbeda dengan jaman dulu.

Dalam etnografi, observasi partisipatif memiliki kekuatan besar dalam pengambilan data selain wawancara mendalam dan studi pustaka. Selama melakukan observasi, peneliti diharapkan

mampu melihat budaya masyarakat dalam konteks yang alami. Menggunakan etnografi dalam baseline tentang perkawinan anak dan sunat perempuan berarti seorang peneliti dituntut menemukan budaya yang ada dalam dua persoalan sosial tersebut. Selama melakukan observasi, peneliti dituntut melakukan refleksi kritis terhadap data temuan dan proses penelitian. Refleksi kritis tersebut berguna untuk menjaga obyektivitas data dan melihat kedalaman data.

C. Pekerjaan Sosial dalam Perkawinan Anak dan Sunat Perempuan

International Federation on International Federation Social Work (ISFW) General Meeting dan the IASSW General Assembly mendefinisikan Pekerjaan Sosial adalah sebuah profesi praktek dan disiplin ilmu yang mempromosikan perubahan sosial dan pembangunan, kohesi sosial dan pemberdayaan dan pembebasan manusia (ISFW, IASSW : 2014). Prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, pertanggungjawaban kolektif dan menghargai perbedaan adalah penting dalam pekerjaan sosial. Didukung oleh teori pekerjaan sosial, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan lokal, pekerjaan sosial melibatkan manusia dan struktur untuk menyelesaikan tantangan dan memperkuat kualitas hidup masyarakat. Dari definisi tersebut tampak bahwa perkawinan anak dan sunat perempuan menjadi dua persoalan yang perlu diintervensi karena menjadi tantangan peningkatan kualitas hidup anak yang menjadi korban perkawinan anak maupun sunat perempuan.

Masyarakat yang semakin kompleks berdampak pada semakin kompleksnya persoalan sosial yang menjadi area intervensi para pekerja sosial. Sejumlah ilmuwan menyadari pentingnya penggunaan metode penelitian yang mampu mengurai ke-kompleks-an masyarakat yang berubah agar intervensi yang dilakukan oleh para pekerja sosial tepat dalam menemukan akar persoalan. Balestery (2016) mengatakan bahwa etnografi membantu para pekerja sosial untuk melihat sesuatu yang seakan-akan tidak ada hubungannya ternyata berhubungan, memotret kehidupan sehari-hari masyarakat secara utuh melalui observasi partisipan dan melihat persoalan social dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari peneliti namun juga dari subyek yang diteliti.

Pengalaman sehari-hari yang mampu terpotret oleh etnografi bukan hanya kehidupan sehari-hari dari subyek yang diteliti. Pengalaman hidup sehari-hari dari para pekerja sosial saat melakukan intervensi social pun penting untuk didokumentasikan. Hasil penelitian Morow (2024) menemukan bahwa interaksi social pekerja sosial sehari-hari di kantor menunjukkan sebuah kolaborasi *social engineering* yang mampu menutup kekurangan dalam setiap tahapan intervensi yang formal mulai dari saat assessment, penulisan laporan assessment, pembacaan ulang laporan assessment.

Meskipun etnografi diakui memiliki keunggulan dalam memotret kehidupan sehari-hari dari subyek yang akan diintervensi, para peneliti sosial juga mengingatkan dilema penggunaan etnografi dalam penelitian untuk kelompok rentan. Relasi kuasa, posisi peneliti (potitionalitas), dan privilege menjadi tiga isu dilema penggunaan etnografi dalam penelitian di area pekerjaan sosial (Nordstedt & Gustafsson, 2022; Powell, 2022). Potitionalitas merujuk pada dilema representasi suara kelompok rentan yang diwakili oleh peneliti atau pekerja sosial. Penelitian etnografi dalam pekerjaan sosial juga harus menyadari privilege yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian seperti para manajer kasus, staf lapangan bahkan peneliti sendiri. Kesadaran akan posisi dan privilege tersebut menumbuhkan kesadaran tentang relasi kuasa antara pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Nordstedt dan Gustafsson (2022) menyarankan penggunaan etnografi kritis untuk mengatasi dilema penelitian tersebut.

D. Perkawinan Anak dalam penelitian-penelitian terdahulu

Perkawinan anak dan sunat perempuan banyak diteliti oleh para sarjana dan peneliti dari berbagai negara dengan menggunakan metode etnografi. Neema (2025) meneliti tentang perkawinan anak di Lira, Uganda. Dalam penelitiannya, Lira menggunakan metode etnografi. Lira ingin mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak dan keluarganya terlibat dalam perkawinan anak. Wawancara mendalam, diskusi terbatas dan observasi terlibat selama digunakan

Neema untuk mengumpulkan data lapangan. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa anak dan keluarganya terlibat dalam perkawinan anak di Uganda karena banyak faktor seperti kemiskinan dan strategi untuk bertahan hidup, putus sekolah, pandangan agama serta budaya tentang perkawinan anak. Dari penelitian tersebut juga diketahui bahwa anak perempuan dalam keluarga Lira dipandang sebagai aset berharga karena keluarga perempuan akan mendapat mahar saat perkawinan terjadi. Mahar akan rendah jika anak hamil di luar nikah.

Baynesagn & Maru Wubie (2025) meneliti fenomena perkawinan anak di daerah Gojjan Zone, Ethiopia. Perkawinan anak di wilayah tersebut tinggi meskipun diberlakukan hukum dan aturan kesehatan yang mengatur dan mengupayakan anak terhindar dari perkawinan anak. Sejumlah faktor pendorong perkawinan anak yang ditemukan peneliti adalah pertama, keinginan mendapatkan penerus keluarga. Kedua, masyarakat ingin menghindari stigma dan sanksi sosial masyarakat. Keluarga yang belum menikah anak tidak diperkenankan datang ke pesta pernikahan tetangga. Ketiga, perkawinan adalah salah satu cara mendapatkan penghargaan sosial dari masyarakat. Keempat, keluarga menginginkan masa depan anaknya lebih baik selagi orang tuanya masih ada. Karena ada aturan hukum, masyarakat menyamakan praktek perkawinan anak ke dalam berbagai acara pesta seperti pesta ulang tahun, pesta keagamaan Mahiber dan kegiatan membangun rumah baru (Baynesagn & Maru Wubie, 2025:108-109).

Pada tahun 2019 sampai dengan 2020, Saran (Bozorgi-Saran & Khodabakhshi-Koolae, 2023) meneliti pengalaman dan dampak perkawinan anak di Teheran, Iran. Parlemen Iran enggan menaikkan umur perkawinan anak meskipun angka perkawinan anak di Teheran tinggi. Perkawinan usia anak di Teheran didorong oleh kemiskinan, stigma perawan tua, menghindari kontrol keluarga serta memenuhi kebutuhan seksual. Perkawinan anak mengakibatkan muncul banyak persoalan seperti depresi, marah dan sedih pasca perkawinan anak, merasakan penolakan, menyalahkan diri sendiri, merasakan beban hidup serta khawatir akan masa depan. Perceraian, keguguran dan ketidaksiapan kerja fisik, terisolasi dirasakan oleh para survivor perkawinan anak. Penelitian ini tidak menggunakan metode etnografi. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dalam meneliti persoalan perkawinan anak.

Di Indonesia, penelitian anak salah satunya dilakukan oleh Horii (2020). Horii meneliti faktor-faktor yang mendorong perkawinan anak di Bali, Indonesia. Meskipun memiliki motif bermacam-macam, kesenjangan antara norma dan pluralitas sistem norma menyangkut sexualitas menjadi akar penyebab perkawinan anak di Bali. Selain itu Horii menemukan bahwa perkawinan anak adalah pilihan antara integritas tubuh, otonomi pribadi dan kepercayaan agama.

E. Penelitian terdahulu tentang Sunat Perempuan

Bihonegn (2025) melakukan penelitian etnografi di Bhichena, Ethiopia dari tahun 2019 hingga tahun 2019. Bihonegn menemukan bahwa *female genital mutilation* (FGM) didorong oleh faktor budaya dan penafsiran agama. Perempuan survivor sunat perempuan merasa kehilangan gairah sexualitas, merasakan sakit saat berhubungan badan, konflik dalam hubungan suami istri pasca dilakukan sunat perempuan. Namun demikian, beberapa informan mengatakan bahwa mereka tidak merasakan dampak negative dari FGM. Dari penelitian itu pula ditemukan bahwa FGM dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat tradisional dan dilakukan di rumah orang tua.

Van Bavel (2022) meneliti tentang hubungan antara pendidikan formal dengan praktek FGM di India. Van Bavel melakukan penelitian etnografi di wilayah Samburu, Kenya mulai Oktober 2017 sampai dengan Desember 2018. Berdasar penelitian Van Bavel, diperoleh hasil bahwa pendidikan formal yang dimiliki oleh informan dapat mencegah terjadinya FGM. Namun demikian, praktek tersebut masih sulit dihentikan karena berkaitan dengan perkawinan, kehormatan dan perasaan malu jika tidak dilakukan sunat perempuan. Temuan lain dari penelitian ini adalah adanya perubahan praktek FGM meskipun tidak terjadi di seluruh kota.

Doucet (2022) melakukan penelitian etnografi tentang penduduk Conkry, Guinea yang melakukan praktek sunat perempuan dan penduduk yang tidak melakukan praktek sunat

perempuan. Doucet dan kawan-kawan menemukan bahwa masyarakat Conkry menjunjung tinggi norma-norma yang mengatur perilaku seksual dan pernikahan. Sunat perempuan dilakukan untuk mengurangi perilaku seksual perempuan dan menunjukkan kehormatan keluarga. Namun demikian, hasil penelitian justru menunjukkan bahwa sunat perempuan tidak mencegah *intercourse* seksual di luar pernikahan. Data justru menunjukkan bahwa FGM membawa dampak negatif sebab mengganggu kepuasan *intercourse* seksual yang menyebabkan perceraian. Selain itu, sunat perempuan dianggap menyebabkan resiko infertilitas perempuan meningkat dan komplikasi kehamilan

PEMBAHASAN

Perkawinan Anak dan FGM: Obyek Kajian Pekerjaan Sosial

Intervensi terhadap persoalan sosial kelompok marjinal termasuk didalamnya perempuan dan anak adalah fokus kajian dan praktek dari para pekerja sosial. Para pekerja sosial ini melakukan intervensi secara individu maupun secara kelompok. Dalam prakteknya, dua pendekatan tersebut tidak dapat dipisahkan secara tegas. Untuk mengembalikan keberfungsian sosial seorang individu, dibutuhkan intervensi terhadap lingkungan dan kelompok yang melingkupinya. Sebaliknya, untuk mengembalikan keberfungsian sosial sebuah kelompok masyarakat, seringkali dibutuhkan pula pendekatan terhadap individu anggota dari kelompok tersebut sebab kondisi seseorang berbeda-beda. Kondisi seseorang yang berbeda-beda inilah yang mengawali kesadaran bahwa dalam intervensi kelompok pun, intervensi terhadap satu orang akan berbeda dengan orang lainnya.

Pekerja sosial profesional membutuhkan sebuah hasil analisa yang baik tentang sebuah permasalahan sosial. Hasil analisa yang baik tersebut dapat membantu subyek yang diintervensi untuk mendapatkan keadilan sosial. Pekerja sosial membutuhkan beberapa prasyarat untuk sampai pada analisa masalah sosial, seperti kemampuan melakukan analisis sosial dan ketersediaan data lapangan yang dalam dan holistik baik dari sisi individu maupun lingkungan atau masyarakat di sekitar individu tersebut. Agar intervensi yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial berifat *evidence based*, intervensi tersebut harus didasarkan pada penelitian ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik permasalahan sosial yang ingin diintervensi.

Perkawinan Anak dan FGM adalah dua persoalan sosial yang menjadi obyek kajian dari pekerjaan sosial. Kedua persoalan ini tidak hanya bentuk pelanggaran HAM, namun juga suatu kondisi yang menjadikan korbannya mengalami disfungsi sosial. Perkawinan anak dan sunat perempuan dapat memunculkan persoalan baru. Perkawinan anak diyakini akan berkontribusi pada persoalan sosial serius yang lain seperti kemiskinan, angka kematian ibu dan anak, stunting, angka putus sekolah dan kesehatan reproduksi remaja. Sementara sunat perempuan pun berkaitan dengan stigma pada perempuan, otonomi tubuh perempuan dan kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan dan anak perempuan menjadi obyek dari praktek-praktek budaya yang berbahaya bagi kesejahteraan mereka.

Pekerjaan sosial memiliki peran penting untuk melakukan intervensi sosial terhadap kedua permasalahan sosial tersebut. Guna mendapatkan strategi intervensi yang tepat, pendekatan feminis dapat digunakan untuk mengurai akar persoalan perkawinan anak dan sunat perempuan. Fungsi pendekatan feminis adalah menganalisa ketidakadilan sosial dalam praktek perkawinan anak dan sunat perempuan.

Etnografi: Menerjemahkan dan Merefleksikan

Temuan baseline menunjukkan bahwa perkawinan anak dan sunat perempuan tidak hanya berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Undang-Undang Perlindungan Anak, 2014). Temuan tim baseline menunjukkan dan PLAN International menunjukkan bahwa perkawinan anak di NTT ditemukan pada masyarakat pendatang dari etnis tertentu dan mayoritas beragama Islam. Kekhawatiran terjerumus pada zina menjadi salah satu alasan keluarga mendorong anak perempuannya untuk menikah meskipun usianya di bawah 18 tahun. Sementara temuan di wilayah yang ditinggali penduduk asli menunjukkan hal yang berbeda. Penduduk asli yang tinggal di wilayah pegunungan menunjukkan bahwa seorang anak perempuan akan menikah setelah orang tua mereka melaksanakan upacara tertentu. Upacara tersebut akan dilakukan di saat anak perempuan berusia sekitar 19 tahun. Dari dua temuan tentang perkawinan anak ini, nampak bahwa tradisi, adat tidak selalu menyebabkan persoalan bagi perempuan dan anak perempuan. Temuan ini justru menunjukkan bahwa adat tradisi sebagai sebuah norma itu bersifat memampukan di satu sisi, di sisi lain memaksa (Giddens, 2016).

Sementara temuan dari baseline tentang sunat perempuan di Jawa Timur dan NTB juga menunjuk bahwa dalam etnis tertentu, sunat perempuan menjadi tradisi yang harus dilakukan terhadap anak perempuan. Salah satu temuan alasan praktek ini adalah agar perempuan tidak agresif. Di wilayah urban, sunat perempuan dipraktikkan oleh keluarga-keluarga pendatang karena mengikuti tradisi daerah asal mereka. Temuan juga menunjukkan bahwa generasi sekarang menganggap bahwa sunat perempuan tidak lagi penting dan menjadi keharusan. Namun demikian, sebagian masyarakat di lokasi baseline masih melakukan praktek tersebut secara sembunyi-sembunyi. Temuan-temuan dalam baseline perkawinan anak dan sunat perempuan menunjukkan bahwa meskipun dua isu tersebut menjadi area intervensi pekerjaan sosial, data menunjukkan bahwa sistem religi, sistem kekerabatan, norma adat, norma agama, norma kesusilaan memiliki kaitan dengan dua fenomena sosial tersebut. Hubungan antara etnis dengan praktek sunat perempuan, salah satunya ditunjukkan oleh Ida dan Saud (2020).

Ethnography menjadi alat bantu untuk menemukan dan menginterpretasikan budaya dan norma-norma yang ada di balik perkawinan anak dan sunat perempuan. Etnografi memberikan kekuasaan bagi subyek penelitian, dalam hal ini para survivor dan masyarakat di area penelitian, untuk memaknai budaya subyek tersebut (Spradley; 1979, 2007). Jika dibaca menggunakan pendapat Spradley tersebut, perkawinan anak menurut penduduk yang melakukannya adalah cara untuk menghindari zida, salah satu dosa besar dalam Islam. Sementara sunat perempuan, bagi penduduk yang melakukannya, dimaknai sebagai cara perlindungan diri bagi perempuan dari perilaku yang tidak baik menurut masyarakat.

Etnografi menempatkan informan dalam penelitian sunat perempuan maupun perkawinan anak sebagai subyek yang akan memberikan informasi penting bagi peneliti. Pekerja sosial dapat menggunakan metode etnografi untuk memahami fenomena perkawinan anak dan sunat perempuan yang seringkali muncul dalam bentuk simbol-simbol. Etnografi bukan hanya menerjemahkan kalimat atau bahasa yang terucap namun juga menterjemahkan bahasa atau kalimat yang tidak terucap (simbol). Peneliti yang menggunakan metode etnografi akan menterjemahkan suatu kebudayaan yang terucap maupun tidak terucap saat mengamati fenomena perkawinan anak dan sunat perempuan.

Etnografi tidak sekedar menterjemahkan budaya dibalik perkawinan anak dan sunat perempuan. Etnografi sebagai metode penelitian yang sering dipergunakan oleh para antropologi

dibedakan menjadi dua yaitu ethnography realis dan ethnography kritis (Creswell, 2015:ix). Posisi peneliti (standpoint) menjadi penentu model etnografi yang digunakan oleh si peneliti. Seorang etnografi realis memilih sebagai seorang peneliti, pengamat dan tidak ada keberpihakan dalam penelitiannya. Sebaliknya, seorang ethnographer yang memilih menggunakan ethnography kritis, akan menentukan sikap dan menempatkan posisi dirinya terhadap subyek yang dia teliti. Dalam konteks peneliti sekaligus pekerja sosial, proses refleksi penting untuk memetakan resiko dan melakukan mitigasi intervensi sosial yang akan dilakukan (Sicora, 2017)

Etnografi kritis juga mampu membantu merefleksikan temuan dari perkawinan anak dan sunat perempuan. Proses refleksi yang ditawarkan oleh etnografi sangat penting untuk melihat bagaimana pengalaman perempuan survivor perempuan perkawinan anak dan survivor sunat perempuan di kedua wilayah tersebut terbangun, saling berkaitan dan menempatkan perempuan dari cerita kehidupan sehari-hari di kedua wilayah tersebut. Kehidupan sehari-hari yang dialami oleh perempuan tersebut bukan hanya kehidupan yang lurus atau mudah dipahami sebab terbukti selama hampir 20 tahun para ethnographer mencoba memahami perpotongan antara kekuasaan, subyektivitas dan perwakilan (Naples, 2003:35; Warren et al., 2000).

Pendekatan feminis dalam Perkawinan Anak dan Sunat Perempuan: meminimalkan dilema penelitian, memotret ketidakadilan, mengurai interseksionalitas isu

Sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan etnografi tidak lepas dari dilema penelitian (Powell, 2022). Dilema penelitian yang ditemui penulis dan tim saat melakukan baseline tentang perkawinan anak dan sunat perempuan, mendorong penulis untuk mengkombinasikan metode etnografi dengan pendekatan feminis. Etnografi feminis tepat digunakan untuk mendekati persoalan ini sebab selain dapat meminimalkan isu dilema penelitian kualitatif, metode ini dapat memotret ketidakadilan sosial yang terjadi dalam isu yang bersifat interseksionalitas (Mulinari & Sandell, 2009). Pendekatan feminis dalam etnografi juga mampu membantu menganalisis isu interseksionalitas yang ada dalam persoalan perkawinan anak dan sunat perempuan.

Dilema pertama adalah posisi kami sebagai peneliti dari luar. Posisionalitas kami sebagai peneliti dalam isu perkawinan anak dan sunat perempuan telah jelas. Kami adalah peneliti yang berasal dari luar area penelitian (outsider researcher). Kami memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat yang akan kami teliti. Kami berbagi pengalaman sebagai perempuan namun kami memiliki pengalaman hidup yang berbeda (Gamble, 2004; Naples, 2003; Rivers, 2017; Tong & Botts, 2018). Sebagai para peneliti yang berlatar belakang aktivis perempuan, kami memahami bahwa cerita mereka yang berbeda dengan cerita kami, adalah sangat berharga.

Posisionalitas ini berkaitan dengan relasi kuasa yang terjadi dalam ruang privat dan ruang publik perempuan. Kedua ruang tersebut tidak dapat dipisahkan sehingga pendekatan feminis digunakan untuk melihat relasi kuasa yang terjadi dalam ruang-ruang tersebut (Naples, 2003; Warren et al., 2000: 45). Kehidupan perempuan berawal dari kehidupan dalam ranah domestik sampai dengan kehidupan mereka di wilayah publik. Di kedua wilayah tersebut, pengalaman perempuan dibangun dan saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam baseline dan evaluasi yang kami lakukan, relasi kuasa terjadi antara kami sebagai peneliti dengan subyek yang kami teliti (perempuan dan anak perempuan termasuk keluarga survivor), relasi kuasa di internal keluarga, relasi kuasa antara perempuan survivor perkawinan anak dan sunat perempuan dengan masyarakat.

Isu kedua yang perlu kami refleksikan adalah privilege kami sebagai peneliti. Survivor perkawinan anak cenderung merasa lebih malu dibanding dengan survivor sunat perempuan. Survivor ini jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah anak perempuan yang belum menikah. Karena jumlahnya yang sedikit, mereka merasa minoritas. Anak perempuan yang telah menikah ini melihat kawan-kawannya masih melanjutkan sekolah. Mereka menjadi kelompok yang 'aneh' menurut mereka sendiri. Mereka juga merasa malu karena perkawinan yang mereka lakukan dikaitkan dengan upaya mencegah zina sebuah pelanggaran norma-norma agama dan kesusilaan. Dalam tulisan Horri (2020) ditemukan bahwa salah satu penyebab perkawinan anak adalah untuk memenuhi hasrat seksualitas (sebuah isu yang dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka). Dengan kondisi demikian, survivor perkawinan anak tersebut secara tidak langsung telah mengidentifikasi diri mereka sebagai orang yang 'bermasalah' (berbeda dengan norma orang kebanyakan), inferior di hadapan peneliti atau orang yang tidak pernah menjadi korban perkawinan anak.

Sementara survivor sunat perempuan ditemukan dalam kondisi yang berbeda. Dalam pengambilan data di Jember dan Lombok Barat, para survivor ini adalah kelompok mayoritas. Mereka didukung oleh struktur sosial dan budaya yang mayoritas berpendapat bahwa sunat perempuan dianggap tidak melanggar norma-norma yang mereka yakini. Oleh sebab itu, saat pengambilan data dilakukan, informan cenderung bersikap biasa, tidak khawatir atau malu saat menceritakan pengalaman diri, keluarganya, saudaranya atau tetangganya. Sebaliknya, dalam masyarakat yang sudah tidak banyak melakukan sunat perempuan, survivor sunat perempuan dan keluarganya cenderung akan malu mengungkapkan ke publik sebab sunat perempuan terjadi dalam ruang yang tersembunyi, bersifat privat dan orang lain tidak tahu. Dalam konteks demikian, peneliti mengalami kesulitan jika hanya mengandalkan metode pengumpulan data secara wawancara dan diskusi terbatas.

SIMPULAN

Artikel-artikel penelitian-tentang perkawinan anak perempuan dan sunat perempuan didominasi oleh tulisan tentang temuan hasil seperti akar persoalan penyebab perkawinan anak dan sunat perempuan. Tulisan yang mengeksplor hubungan metode penelitian kedua isu tersebut dengan disiplin ilmu pekerjaan sosial masih jarang. Pengalaman peneliti selama tergabung dalam tim baseline tentang sunat perempuan di NTB dan di Jawa Timur dan tim evaluasi perkawinan anak di NTT menunjukkan bahwa proses baseline isu sosial jika direfleksikan mampu menjadi cara untuk memproduksi pengetahuan. Perkawinan anak dan sunat perempuan adalah dua persoalan sosial yang menjadi area dari intervensi para pekerja sosial. Kedua persoalan tersebut erat kaitannya dengan faktor budaya dan interseksionalitas isu.

Perkawinan anak dan sunat perempuan merupakan dua persoalan ketidakadilan yang sering menimpa perempuan dan perempuan anak. Seorang pekerja sosial memiliki tugas membantu menjawab persoalan tersebut melalui intervensi yang didesain dan dilaksanakan secara tepat. Etnografi, yang pada awalnya banyak digunakan oleh para antropolog, menjadi metode penelitian penting untuk membantu mengungkap makna budaya di balik praktek perkawinan anak dan sunat perempuan. Etnografi mampu mendeskripsikan gambaran utuh tentang persoalan sosial yang dihadapi oleh subyek penelitian dan kebudayaan kelompok tersebut melalui proses penterjemahan dan refleksi. Kemampuan menterjemahkan budaya masyarakat yang mempraktekan

perkawinan anak dan sunat perempuan menjadi salah satu kunci menemukan akar persoalan kedua masalah sosial tersebut. Namun demikian, dalam konteks intervensi sosial yang terprogram, pelaksanaan ethnography disesuaikan dengan kebutuhan dan jangka waktu program. Dalam konteks ini, mini etnografi lebih tepat digunakan oleh peneliti.

Tradisi refleksi dalam ethnography merupakan aspek lain yang juga penting dalam praktek pekerjaan sosial kritis. Refleksi tersebut dilakukan terhadap temuan data dan terhadap proses penelitian yang dilakukan. Dalam proses refleksi tersebut akan terlihat praktek kuasa yang tidakimbang sebagai akar persoalan ketidakadilan sosial dalam kasus perkawinan anak dan sunat perempuan. Agar mampu merefleksikan relasi kuasa secara baik dalam berbagai isu yang menyangkut perempuan, etnografi perlu dikombinasikan dengan pendekatan feminis. Pendekatan feminis digunakan untuk melihat relasi kekuasaan dalam masyarakat, keluarga dan komunitas yang mempraktekan perkawinan anak dan sunat perempuan. Selain itu, dengan pendekatan feminis, seorang peneliti mampu melihat perpotongan isu yang terdapat dalam kasus-kasus yang menempatkan perempuan dan anak perempuan dalam posisi rentan. Semakin cermat melihat perpotongan isu, semakin tepat intervensi sosial yang akan dilakukan oleh seorang pekerja sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2014). Solusi Antropologi Untuk Indonesia ; Kearifan Lokal, Pendidikan dan Kebijakan Berwawasan Budaya. In Teori, Etnografi dan Refleksi. PINTAL.
- Abdullah, I. (2015). Realitas Politik, Deteritorialisasi Sial, dan Redefinisi Penelitian Budaya: Aceh sebagai Field of Study. In Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan (V, pp. 121-137).
- Agar, M. H. (1996). *The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography* (2nd ed) (2nd ed.). Academic Press.
- Balestrery, J. E. (2016). Social Work Education without Walls: Ethnography as a Lens for Transformative Learning. *Social Work Education*, 35(6), 615-631. <https://doi.org/10.1080/02615479.2016.1151490>
- Bavel, H. V. (2022). Education, Class, and Female Genital Cutting among the Samburu of the Northern Kenya: Challenging the Reproduction of the "Ignorant Pastoralist" Narrative in Anticutting Campaign. *Journals.Sagepub.Com/Home/Vaw*, 15-16, 3742-3761. <https://doi.org/10.1177/10778012221079376>
- Baynesagn, A. H., & Maru Wubie, T. (2025). Locked in Tradition: Upholding Child Marriage Practice in East Gojjam Zone, Ethiopian. *Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services*, 106(1), 102-115. <https://doi.org/10.1177/10443894241233330>
- Bernard, H. R. (2006). *Research Methods In Antropologi, Qualitative and Quantitative Approaches* (4th ed). AltaMira Press.
- Bihonegn, A. A., Hailu, K. H., & Shiferaw, A. M. (2025). Understanding the Lived Experiences of Women Underwent Female Genital Mutilation (FGM) in Bichena Town, North-Western Ethiopia. *Journal of Social Service Research*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/01488376.2025.2451941>

- Bozorgi-Saran, S., & Khodabakhshi-Koolae, A. (2023). Child bride, a story that never ends: A look at experiences of Iranian women. *International Social Work*, 66(5), 1497–1512. <https://doi.org/10.1177/00208728211066830>
- Clifford, J., & Marcus, G. (1986). *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. University of California Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Doucet, M.-H., Delamou, A., Manet, H., & Groleau, D. (2022). Beyond the Sociocultural Rhetoric: Female Genital Mutilation, Cultural Values and the Symbolic Capital (Honor) of Women and Their Family in Conakry, Guinea—A Focused Ethnography Among “Positive Deviants.” *Sexuality & Culture*, 26(5), 1858–1884. <https://doi.org/10.1007/s12119-022-09975-5>
- Gamble, S. (2004). *Feminism and Post Feminism*. Routledge.
- Giddens, A. (2016). *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* (II). Pustaka Pelajar.
- Horii, H. (2020). Child Marriage as a ‘Solution’ to Modern Youth in Bali. *Progress in Development Studies*, 20(4), 282–295. <https://doi.org/10.1177/1464993420977793>
- Ida, R., & Saud, M. (2020). Female Circumsision and The Construction of Female Sexuality: A Study on Maduranese in Indonesia. *Sexuality and Culture*, 24(565), 1987–2006. <https://doi.org/10.1007/S12119-020-09732-6>
- ISFW dan IASSW. (2014). *Global Definition of the Social Work Profession*, <https://ifsw.org/what-is-social-work/global-defenition-of-social-work>
- Marcus, G. E. (1991). Requirements for Ethnographies of Late-20th-Century Modernity Worldwide. In *Ethnography through Thick and Thin* (pp. 57–78). Princenton University Press.
- Miller, T., Smith, K., & Lockwood, K. (2017). *Doing Narrative Research? Thinking Through The Narative Process*. In *Feminis Narrative: Research Opportunities and Challenge* (pp. 39–60). Palgrave Macmillan.
- Morrow, F. (2024). Invisible authors: An ethnography of the social life of social work assessment. *Journal of Social Work Practice*, 38(4), 373–386. <https://doi.org/10.1080/02650533.2024.2402811>
- Mubarok, Achmad Sofiyul, Muhammad Ainun Rofiq, M. Khoirul Hadi al Asyari. (2026). Tradisi Pernikahan Colong dalam Masyarakat Osing : Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Teks Keagamaan Islam dan Praktik Kultural di Banyuwangi. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 6(1), 127-139. <https://jfgs.jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS>
- Mulinari, D., & Sandell, K. (2009). A Feminis Re-reading of Theories of Late Modernity: Beck, Giddens and the Location of Gender. *Critical Sociology*, 35(4), 493–507. <https://doi.org/10.1177/0896920509103980>
- Naples, N. A. (2003). *Feminism and method: Ethnography, discourse analysis, and activist research*. Routledge.

- Neema, S., Muhumuza, C., Nakigudde, R., Uldbjerg, C. S., & Muhwezi, E. (2025). "Trading daughters for livestock."
- Noerdin, E. (with Women Research Institute). (2005). *Politik identitas perempuan Aceh* (Cet. 1). Women Research Institute.
- Nordstedt, M., & Gustafsson, K. (2022). From Experience to Text: Issues of Representation, Disclosure, and Understanding in Ethnographic Social Work Research. *Ethics and Social Welfare*, 16(3), 274–289. <https://doi.org/10.1080/17496535.2021.2021265>
- Powell, D. (2022). *Critical Ethnography in Schools: Reflections on Power, Positionality, and Privilege*. 35(1), 18–31. <https://doi.org/10.1080/09518398.2021.1888160>
- Putra, Heddy Shri Ahimsa (ed). (2014). *Teori, Ethnografi dan Refleksi*. Pital.
- Rivers, N. (2017). *Postfeminism and The Arrival of the Fourth wave*. Palgrave Macmillan.
- Sicora, A. (2017). Reflective Practice, Risk and Mistakes in Social Work. *Journal of Social Work Practice*, 31(4), 491–502. <https://doi.org/10.1080/02650533.2017.1394823>
- Spradley, J. P. (1979). *The ethnographic interview*. Holt, Rinehart and Winston. Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi* (Kedua). Tiara Wacana.
- Suryakusuma, J. (2011). *Ibuism Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru* (1st ed.). Komunitas Bambu.
- Tong, R. P., & Botts, T. F. (2018). *A Feminis Thought: A More Comprehensive Introduction* (Fifth). Routledge Taylor&Francis Group.
- Undang-Undang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- Wariyatun, W. (2021b). Refleksi Penelitian Ethnography Feminis dalam Masa Pandemic. In *Prosiding International Conference on Indonesia Culture The Resilience of The Cultural Ecosystem through the Pandemic* (pp. 319–328). Kemenristek Dikbud - FIB UGM - Koalisi Seni.
- Warren, C. A. B., Hackney, J. K., & Warren, C. A. B. (2000). *Gender issues in ethnography* (2nd ed). Sage Publications.